

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Yayasan Fort De Kock diawali dengan pengajuan permohonan eksekusi oleh Yayasan Fort De Kock. Setelah itu, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* bagi para termohon dan memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak. Berdasarkan penetapan eksekusi sesuai kesepakatan pemohon eksekusi dan Berdasarkan pernyataan dari kuasa pemohon eksekusi serta Berdasarkan Penetapan ketua pengadilan negeri Bukittinggi tentang penetapan eksekusi perubahan diktum putusan, bahwa eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan diganti dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Kemudian kuasa pemohon eksekusi menyerahkan uang kepada panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi kelas 1B sebesar Rp. 1.243.800.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi kelas 1B menyerahkan uang tersebut kepada Syafri Sutan Pangeran selaku tergugat 1. Setelah dijalankannya eksekusi berupa penitipan sejumlah uang kepada panitera, maka eksekusi terhadap putusan pengadilan yang memenangkan Yayasan Fort De Kock dinyatakan selesai.
2. Upaya yang dilakukan oleh Yayasan Fort de Kock dalam pemenuhan hak atas tanah yang disengketakan berupa Pengajuan permohonan pembatalan

sertifikat tanah kepada Peradilan Tata Usaha Negara guna dilakukannya Pembuatan sertifikat baru terhadap kepemilikan tanah yang secara resmi dimiliki oleh Yayasan Fort De Kock berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada seluruh tergugat untuk dapat patuh dan tunduk melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan putusan pada tingkat kasasi yang di keluarkan oleh mahkamah agung merupakan putusan tertinggi dan tidak memiliki upaya hukum lainnya.
2. Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi seharusnya sebagai pemerintah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Kalahnya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam perkara ini seharusnya dapat di jadikan pelajaran dan evaluasi agar tidak terjadi lagi hal semacam ini kedepannya.

